

# MEMO HUKUM

YUNIAWAN HARIPUTRA

## PENINGKATAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

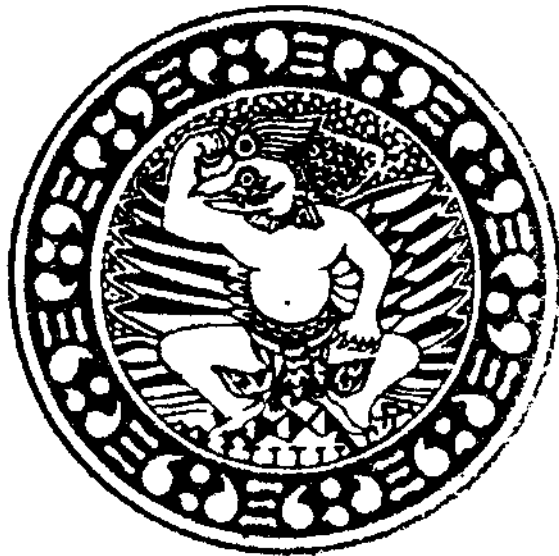


KK.  
Per 2199/96  
Har  
p

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996

**PENINGKATAN UPAH MINIMUM  
SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA**



KK.  
Per. 2199/96  
Har  
P.

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**MEMO HUKUM**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**

**R. INDIARORO, S.H.  
NIP. 130 325 845**

**Penyusun,**

**YUNIAWAN HARIPUTRA  
NIM. 039213591**

## V. PENUTUP

### 1. Kesimpulan.

- a. Beberapa hal yang menyebabkan keengganan pengusaha untuk melaksanakan SK. Menaker 2/1996 adalah banyaknya pungutan-pungutan baik resmi maupun tak resmi yang membebani biaya produksi, rendahnya skill dan produktivitas para pekerja dan perbedaan persepsi tentang kewajiban pembayaran upah oleh perusahaan bagi pekerja minimum sebulan (30 hari).
- b. Keberadaan peraturan-peraturan pemerintah di bidang pengupahan saat ini diharapkan untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum pekerja Indonesia, karena selama ini kaum pengusaha telah dimanjakan oleh paradigma seperti upah buruh yang murah dan dijadikan sebagai keunggulan komparatif dan dijual ke luar negeri. Jadi selama 25 tahun ini, pekerja Indonesia sudah berkorban mensubsidi dunia usaha.
- c. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat kurang sekali dan juga peraturan yang ada kurang mempunyai wibawa sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayar upah sesuai ketentuan pemerintah.

### 2. Saran.

- a. Perlu diadakan tindakan yang tegas terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan pemerintah di bidang pengupahan ini. Sedangkan bagi pemerintah perlu adanya kemauan keras untuk menghapus pungutan

yang membebani, khususnya yang tak terkait dengan proses produksi dan distribusi di perusahaan.

b. Tata cara untuk menetapkan besarnya UMR selama ini merupakan bagian dari politik pengupahan yang tertutup, dimana buruh tidak memiliki fasilitas maupun kesempatan untuk menentukan sendiri besarnya nominal maupun unsur-unsur pengupahan secara layak menurut kemanusiaan. Oleh karena itu hendaknya upaya peningkatan UMR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kepentingan perekonomian baik secara regional maupun nasional.

c. Hendaknya ketentuan yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman bagi pelanggar UMR ini ditinjau kembali. Karena sudah tidak sesuai jika dibandingkan dengan akibat pelanggaran yang ditimbulkan maupun nilai dari peraturan tersebut sebagai alat hukum yang harus ditegakkan.